



Keadilan Bencana dan Gerakan Sosial Perkotaan: Analisis Sosiologi Al-Qur'an atas Demonstrasi Forum Korban Banjir Kota Langsa

Muhammad Roni¹

¹Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh Indonesia
muhammad_roni@iainlangsa.ac.id

Abstract

Disaster management should ideally be implemented based on the principles of justice, transparency, and trustworthiness to ensure that post-disaster assistance is distributed appropriately and equitably. However, the reality of flood relief distribution in Langsa City reveals delays, unclear beneficiary data, and allegations of nepotism and discrimination, which prompted the Langsa City Flood Victim Forum (FKBK) to stage a demonstration in April 2026. This study aims to analyze the gap between the Qur'anic values of justice and the reality of disaster relief policies, as well as to examine the FKBK demonstration as an urban social movement responding to structural injustice. The study employs a qualitative method with a case study approach and critical discourse analysis of relevant Qur'anic texts, including Q.S. An-Nisa' (4): 58 on trustworthiness, Q.S. Al-Ma'idah (5): 8 on justice, Q.S. Al-Hujurat (49): 9 on conflict resolution, and the concept of *mustadh'afin*. The findings indicate that the FKBK demonstration represents a demand for distributive justice and government accountability, while also serving as a space for negotiation toward conflict resolution through the principle of *islah*. This study contributes to expanding the application of the Sociology of the Qur'an in analyzing social movements and disaster policies, while offering an ethical foundation for fair, transparent, and accountable disaster relief governance.

Keywords: Disaster Justice, Urban Social Movement, Sociology of the Qur'an.

Abstrak

Penanganan bencana idealnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah agar bantuan pascabencana dapat diterima secara tepat dan merata. Namun, realitas penyaluran bantuan banjir di Kota Langsa

menunjukkan keterlambatan, ketidakjelasan data penerima, serta dugaan nepotisme dan diskriminasi yang mendorong munculnya demonstrasi Forum Korban Banjir Kota Langsa (FKBK) pada April 2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur'an dan realitas kebijakan bantuan bencana serta mengkaji demonstrasi FKBK sebagai gerakan sosial perkotaan dalam merespons ketidakadilan struktural. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis wacana kritis terhadap QS. An-Nisa' (4): 58 tentang amanah, QS. Al-Ma'idah (5): 8 tentang keadilan, QS. Al-Hujurat (49): 9 tentang penyelesaian konflik, serta konsep mustadh'afin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demonstrasi FKBK merupakan bentuk tuntutan keadilan distributif dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus ruang negosiasi yang mengarah pada penyelesaian konflik melalui prinsip islah. Penelitian ini berkontribusi memperluas penerapan Sosiologi Al-Qur'an dalam menganalisis gerakan sosial dan kebijakan kebencanaan serta menawarkan landasan etis bagi tata kelola bantuan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: *Keadilan Bencana, Gerakan Sosial Perkotaan, Sosiologi Al-Qur'an.*

INTRODUCTION

Bencana alam merupakan ujian kolektif yang tidak hanya menguji ketahanan fisik dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menguji integritas tata kelola pemerintahan dan solidaritas sosial. Dalam perspektif Islam, bencana dipahami secara teologis sebagai bagian dari kehendak Allah yang senantiasa berada dalam bingkai kasih sayang dan kebaikan, sekaligus secara sosiologis dibaca melalui peran manusia sebagai khalifah yang memiliki mandat menjaga kelestarian alam dan menjalankan keadilan sosial. Idealnya, penanganan bencana—khususnya dalam penyaluran bantuan—harus mencerminkan nilai-nilai keadilan (al-'adl), amanah, dan tanggung jawab publik sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an (Hafit et al., 2026). Pemerintah sebagai pemegang amanah publik berkewajiban menyalurkan bantuan secara transparan, tepat sasaran, dan tanpa diskriminasi.

Namun, realitas di lapangan kerap menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara idealitas nilai-nilai Qur'ani dengan praktik kebijakan publik. Kasus demonstrasi Forum Korban Banjir Kota Langsa (FKBK) yang terjadi pada April 2026 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan bantuan pasca-bencana dapat memicu gerakan sosial perkotaan yang berpotensi mengganggu harmoni sosial. Ratusan warga, yang sebagian besar adalah ibu-ibu, turun ke jalan menuntut pencairan bantuan banjir yang dianggap lamban, tidak transparan, dan sarat dengan dugaan nepotisme serta diskriminasi.

Kejadian ini menarik untuk dikaji karena demonstrasi tersebut bukan dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis atau agama yang sering menjadi pemicu

konflik horizontal di Indonesia melainkan oleh ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan amanah publik. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan distributif dan akuntabilitas kebijakan publik dapat menjadi pemicu ketegangan sosial yang serius, bahkan di wilayah yang secara umum dikenal memiliki relasi sosial yang harmonis.

Ketegangan ini semakin terasa ketika koordinator aksi menyatakan bahwa data penerima bantuan yang "carut-marut" berpotensi memicu konflik horizontal di antara warga. Artinya, bukan hanya relasi vertikal antara warga dan pemerintah yang meregang, tetapi juga relasi horizontal antarsesama warga terancam terganggu akibat ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. Dalam konteks ini, prinsip keadilan yang diajarkan Al-Qur'an—yang menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan terhadap diri sendiri dan kerabat (QS. An-Nisa [4]:135) menjadi relevan untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik telah mencerminkan nilai-nilai ilahiyah .

Kota Langsa sebagai lokus penelitian menarik perhatian karena Aceh dikenal sebagai wilayah yang menjalankan syariat Islam. Namun, implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik ternyata masih menemui tantangan, sebagaimana terlihat dalam kasus ini. Kesenjangan antara nilai-nilai keislaman yang diidealkan dengan praktik pemerintahan sehari-hari menjadi celah yang perlu diteliti secara kritis. Penelitian sebelumnya tentang masyarakat Aceh pascabencana menunjukkan bahwa ketahanan sosial tidak hanya dibangun dari bawah (bottom-up), tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan publik yang responsif (Roni et al., 2025). Namun, kekuatan utama masyarakat Aceh terletak pada kemampuan mereka mengintegrasikan nilai Qur'ani ke dalam praktik sehari-hari, yang menunjukkan bahwa ketahanan sosial bersifat kontekstual dan berbasis nilai lokal.

Dalam kasus FKBK, respons masyarakat yang terorganisir melalui forum dan aksi demonstrasi dapat dibaca sebagai bentuk resistensi terhadap ketidakadilan struktural sekaligus sebagai upaya untuk menegaskan kembali nilai-nilai keadilan yang mereka yakini (Syukri et al., 2025). Gerakan ini, jika ditelisik lebih dalam, bukan sekadar aksi protes material, tetapi juga merupakan kritik sosial terhadap kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanah publik—sebuah amanah yang dalam perspektif Al-Qur'an merupakan fondasi kepemimpinan yang baik (QS. An-Nisa [4]:58).

Penelitian tentang gerakan sosial dalam perspektif Islam telah dilakukan oleh berbagai kalangan, namun masih terbatas yang secara spesifik mengaitkan gerakan sosial perkotaan pascabencana dengan analisis Sosiologi Al-Qur'an. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat diidentifikasi sebagai berikut: Penelitian tentang prinsip-prinsip gerakan protes sosial dalam perspektif hukum Islam menemukan bahwa prinsip-prinsip tersebut dibangun di atas doktrin hak dan kewajiban antara rakyat dan penguasa, yang mencakup prinsip hisbah, kebebasan berekspresi, musyawarah, dan prinsip konstitusional . Penelitian ini juga membagi metode pelaksanaan demonstrasi menjadi dua, yaitu metode eksklusif dan metode inklusif. Namun, penelitian ini lebih fokus pada aspek hukum

Islam (fiqh siyasah) daripada analisis sosiologis yang mendalam terhadap teks-teks Al-Qur'an dalam konteks gerakan sosial kontemporer.

Penelitian tentang pemimpin demokratis perspektif Al-Qur'an yang mengkaji ayat-ayat kepemimpinan dalam Tafsir Fathul Bayan menemukan bahwa ayat-ayat tentang kepemimpinan demokratis mencakup: (1) pemimpin yang bermusyawarah, (2) pemimpin yang adil dalam menyampaikan keputusan (QS. Al-Maidah [5]:8 dan QS. Asy-Syura [42]:15), (3) pemimpin yang memandang persamaan dan jujur dalam menghukumi (QS. Al-Hujurat [49]:13), dan (4) pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab (QS. An-Nisa [4]:58). Penelitian ini memberikan landasan normatif yang kuat tentang kriteria kepemimpinan ideal, tetapi belum mengaitkan secara empiris dengan kasus-kasus aktual di lapangan.

Penelitian tentang penerapan prinsip *asbāb al-nuzūl* dan implikasinya terhadap tafsir sosial, khususnya QS. An-Nisa [4]:58 dan QS. Al-Hujurat [49]:9 dalam Tafsir al-Jalālain, menemukan bahwa kedua ayat tersebut menekankan nilai-nilai amanah dan keadilan dalam kepemimpinan publik serta pentingnya rekonsiliasi dalam mitigasi konflik sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *al-'ibrah bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ as-sabab* menguniversalkan pesan ayat-ayat tersebut sehingga relevan lintas zaman. Namun, penelitian ini masih bersifat tekstual dan belum mengaplikasikan temuan tafsirnya ke dalam analisis kasus sosial kontemporer.

Penelitian tentang ketahanan sosial masyarakat Aceh Tamiang pasca-banjir bandang dengan pendekatan Sosiologi Al-Qur'an menemukan bahwa nilai-nilai Qur'ani seperti *ta'āwun* (tolong-menolong), *al-'adl* (keadilan), dan *ukhuwwah ijtīmā'iyah* (persaudaraan sosial) bertransformasi dari prinsip normatif menjadi praksis sosial yang hidup dalam situasi krisis. Praktik muamalat pascabencana berkembang secara adaptif dengan menekankan solidaritas dan redistribusi sumber daya berbasis kebutuhan. Penelitian ini sangat relevan karena menggunakan pendekatan Sosiologi Al-Qur'an yang sama dan berlokasi di Aceh. Namun, penelitian ini lebih fokus pada praktik muamalat ekonomi masyarakat, bukan pada gerakan sosial protes terhadap kebijakan pemerintah.

Penelitian tentang morfologi sosial kota dalam perspektif Al-Qur'an berdasarkan pemikiran Ibn 'Āshūr dalam kitab *al-Taḥrīr wa Tanwīr* menemukan bahwa penduduk kota memiliki peran signifikan dalam membentuk morfologi kota, dan penduduk kota berbeda dari penduduk desa dalam hal keimanan, kepedulian sosial, dan bahkan pembentukan bentuk kota. Penelitian ini relevan untuk memahami dinamika sosial perkotaan di Langsa, namun belum membahas aspek gerakan sosial protes.

Penelitian tentang konsep keadilan dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir Ibnu Katsir pada enam ayat (An-Nisa ayat 58, An-Nisa ayat 135, Al-Maidah ayat 8, Al-Nahl ayat 90, Sad ayat 26, dan Al-Hujurat ayat 9) menemukan bahwa keadilan dimaknai sebagai mewujudkan kesamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketika seseorang memutuskan suatu hukum dan memberikan kesaksian, hal itu harus dilakukan dengan adil, jujur, tidak berat sebelah, dan tidak membedakan antara satu dengan yang lain, sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga,

kerabat, orang kaya, orang miskin, atau musuh sekalipun. Penelitian ini memberikan landasan teologis yang komprehensif tentang konsep keadilan, namun masih bersifat normatif-teoritis.

Perbedaan penelitian ini dengan kajian-kajian terdahulu terletak pada upaya mengintegrasikan analisis teks Al-Qur'an dengan studi kasus gerakan sosial perkotaan kontemporer. Penelitian ini tidak hanya membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara normatif, tetapi juga mengkontekstualisasikannya ke dalam realitas sosial yang aktual—yaitu demonstrasi FKBK di Kota Langsa. Pendekatan Sosiologi Al-Qur'an yang digunakan menjembatani kesenjangan antara idealitas teks dan realitas sosial, sebagaimana juga dilakukan dalam penelitian tentang masyarakat Aceh pascabencana. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah akademik yang masih jarang disentuh: analisis gerakan sosial protes dengan lensa Sosiologi Al-Qur'an.

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya diskursus Sosiologi Al-Qur'an dengan menghadirkan model analisis yang kontekstual dan empiris, sehingga menjembatani kesenjangan antara idealitas teks dan realitas sosial kontemporer. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian tentang masyarakat Aceh pascabencana yang menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Qur'ani ke dalam analisis sosial. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi gerakan sosial di Indonesia dengan memasukkan perspektif keislaman yang selama ini masih terbatas.

Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan perlunya integrasi nilai-nilai Qur'ani tentang keadilan, amanah, dan resolusi konflik ke dalam kebijakan penanganan bencana dan tata kelola pemerintahan. Kasus FKBK menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanah publik tidak hanya berdampak pada ketidakpuasan material, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang mengancam harmoni masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyediakan kerangka aplikatif bagi pembangunan ketahanan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam konteks masyarakat perkotaan yang rentan terhadap bencana.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena demonstrasi FKBK sebagai gerakan sosial perkotaan dalam perspektif Sosiologi Al-Qur'an. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang terdiri dari pengurus FKBK (K1-FKBK, K2-FKBK, K3-FKBK), aparat pemerintah Kota Langsa (P1-BPBD, P2-Bagkesra), tokoh masyarakat (T1-TokohAdat, T2-TokohAgama), dan warga terdampak banjir yang tidak terlibat demonstrasi (W1, W2, W3); (2) observasi partisipatif terhadap dinamika sosial masyarakat pasca-demonstrasi dan proses negosiasi antara FKBK dengan pemerintah; dan (3) dokumentasi berupa pemberitaan media massa

(Serambinews, Aceh Trend), dokumen resmi Pemkot Langsa terkait penanganan banjir, serta tafsir Al-Qur'an klasik dan kontemporer yang relevan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, metode, dan teori, yang melibatkan pengecekan silang informasi dari berbagai informan dan sumber data, serta penggunaan berbagai perspektif teoretis untuk menginterpretasikan temuan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk membaca teks-teks Al-Qur'an dan mengkontekstualisasikannya dengan realitas sosial yang diteliti.

DISCUSSION

Kronologi dan Dinamika Demonstrasi FKBB

Demonstrasi Forum Korban Banjir Kota Langsa (FKBK) terjadi dalam dua gelombang pada bulan April 2026. Aksi pertama berlangsung pada 2 April 2026, di mana puluhan hingga ratusan warga yang didominasi ibu-ibu melakukan aksi di Kantor Wali Kota dan Kejaksaan Negeri Langsa. Mereka menilai proses pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bermasalah, lamban, dan data penerima "carut marut" sehingga berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Aksi kedua berlangsung pada 30 April 2026 dengan skala yang lebih besar. Ratusan warga berkumpul di Lapangan Merdeka lalu bergerak ke Kantor Wali Kota, Kejaksaan Negeri, dan Gedung DPRK Langsa. Aksi ini berlangsung dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan.

Dalam aksinya, FKBB menyampaikan enam tuntutan utama kepada Wali Kota Langsa. Pertama, mendesak pencairan bantuan banjir secara adil tanpa diskriminasi dan nepotisme. Kedua, meminta aparat penegak hukum menyelidiki proses pendataan dan penyaluran bantuan, termasuk dugaan penggunaan dana BTT APBK Langsa 2025 yang bermasalah. Ketiga, mendesak DPRK Langsa membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal transparansi dan ketepatan sasaran bantuan banjir. Keempat, menilai Wali Kota gagal dalam pemulihan pasca-banjir dan menuntutnya untuk mundur dari jabatan. Kelima, meminta agar kebijakan penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) dihentikan karena dianggap terkait dengan upaya normalisasi saluran air. Keenam, mendesak penangkapan dan pengadilan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi dana APBK Langsa.

Berdasarkan wawancara dengan (K1-FKBB, 2026), tuntutan ini lahir dari rasa frustrasi yang mendalam. *"Kami sudah bersabar menunggu bantuan turun, tapi tidak ada kejelasan. Data penerima bantuan berubah-ubah, banyak warga yang berhak malah tidak terdata,"* ungkapnya. Hal senada disampaikan oleh K2-FKBB yang mengaku telah mengurus administrasi berkali-kali namun tetap tidak masuk sebagai penerima bantuan. Sementara itu, (P1-BPBD, 2026) membantah adanya unsur kesengajaan dalam keterlambatan penyaluran. *"Kami bekerja sesuai prosedur, tapi memang proses verifikasi data membutuhkan waktu karena jumlah*

korban banyak dan data di lapangan dinamis," jelasnya. Namun, pengakuan ini justru memperkuat keluhan warga bahwa sistem pendataan tidak akuntabel.

Respons Pemerintah dan Hasil Akhir

Demonstrasi FKBK kemudian memperoleh respons langsung dari Pemerintah Kota Langsa. Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana Putra, menjelaskan bahwa bantuan tahap pertama telah disalurkan kepada 1.354 kepala keluarga, sedangkan bantuan tahap kedua masih dalam proses pengusulan kepada pemerintah pusat dengan nilai anggaran yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Pemerintah juga membantah adanya praktik nepotisme dalam distribusi bantuan dan menegaskan bahwa dana tersebut tidak dikelola secara langsung oleh Pemerintah Kota Langsa, melainkan disalurkan melalui bank atau kantor pos.

Penjelasan tersebut, bagaimanapun, tidak sepenuhnya meredakan keresahan warga. Bagi masyarakat yang terdampak, persoalan utama tidak hanya berkaitan dengan siapa yang mengelola dana, tetapi juga dengan akurasi data dan kepastian bahwa bantuan benar-benar menjangkau seluruh korban yang berhak. Ketidakjelasan data penerima menjadi salah satu sumber ketidakpercayaan terhadap mekanisme distribusi bantuan. Dalam konteks ini, kritik warga memperlihatkan adanya tuntutan agar pemerintah tidak sekadar menjelaskan mekanisme pencairan, tetapi juga memastikan validitas data dan keterbukaan proses distribusi. Sebagaimana tercermin dalam pernyataan salah seorang warga, persoalan tersebut dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran (W1, 2026).

Dinamika aksi akhirnya bergerak menuju proses negosiasi antara massa FKBK dan pemerintah. Dalam proses tersebut, Wali Kota Langsa menandatangani surat pernyataan yang memuat komitmen untuk menyalurkan bantuan sesuai ketentuan dan tanpa diskriminasi. Sementara itu, dugaan penyimpangan data maupun potensi tindak pidana korupsi diarahkan untuk diproses melalui aparat penegak hukum. Kesepakatan tersebut menjadi titik akhir demonstrasi, yang kemudian berlangsung tanpa eskalasi dan massa membubarkan diri secara tertib.

Persoalan bantuan tidak berhenti pada kesepakatan antara demonstran dan pemerintah. Sebagai tindak lanjut, perwakilan FKBK menyerahkan dokumen dugaan penyelewengan dana bantuan kepada Kejaksaan Negeri Langsa. Langkah ini menunjukkan bahwa gerakan warga tidak hanya berhenti pada ekspresi protes di ruang publik, tetapi berkembang menjadi upaya mendorong mekanisme pertanggungjawaban melalui jalur hukum. Demonstrasi FKBK memperlihatkan pergeseran dari ekspresi ketidakpuasan menuju negosiasi dan pengawasan publik, sekaligus membuka ruang bagi penyelesaian persoalan melalui mekanisme institusional.

Potensi Konflik Horizontal

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah munculnya potensi konflik horizontal sebagai dampak dari ketidakjelasan distribusi bantuan

pascabencana. Persoalan yang semula berpusat pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah secara perlahan bergeser menjadi ketegangan di tingkat masyarakat. Ketika bantuan tidak diterima secara merata dan mekanisme pendataan dianggap tidak transparan, warga mulai membandingkan kondisi mereka dengan orang lain yang memperoleh bantuan. Perbandingan tersebut melahirkan persepsi ketidakadilan yang kemudian berkembang menjadi rasa curiga dan ketidakpercayaan.

Dalam konteks ini, masalah utama bukan semata-mata jumlah bantuan yang diterima, melainkan persepsi mengenai keadilan prosedural. Masyarakat cenderung lebih mudah menerima perbedaan hasil apabila proses yang melatarbelakanginya dipandang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, ketika kriteria penerima bantuan tidak dipahami secara jelas, muncul ruang bagi berbagai spekulasi mengenai adanya perlakuan istimewa, kedekatan personal, atau kepentingan tertentu dalam proses penyaluran bantuan. Kondisi ini memperkuat sentimen negatif di tengah masyarakat, meskipun belum tentu didukung oleh bukti yang memadai.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketidakpuasan warga tidak lagi hanya diarahkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan, tetapi mulai menyasar sesama warga yang dianggap memperoleh keuntungan dari situasi tersebut. Beberapa warga mengaku merasa dirugikan ketika melihat tetangganya menerima bantuan sementara mereka tidak. Akibatnya, hubungan sosial yang sebelumnya berjalan normal mulai mengalami perubahan. Muncul sikap menjaga jarak, berkurangnya komunikasi, dan berkembangnya prasangka terhadap pihak-pihak yang dianggap memperoleh prioritas bantuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan distributif yang dipersepsikan tidak adil dapat menghasilkan konsekuensi sosial yang lebih luas daripada sekadar ketidakpuasan administratif.

Dari perspektif sosiologis, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *deprivasi relatif (relative deprivation)*, yaitu situasi ketika individu merasa dirugikan bukan karena tidak memiliki sesuatu secara absolut, tetapi karena membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap memperoleh perlakuan lebih baik. Dalam situasi pascabencana, ketika sebagian besar warga berada dalam kondisi rentan secara ekonomi maupun psikologis, sensitivitas terhadap perbedaan perlakuan menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, ketidakjelasan distribusi bantuan berpotensi memperkuat rasa ketidakadilan kolektif dan memperbesar peluang terjadinya gesekan sosial.

Meskipun penelitian ini tidak menemukan adanya konflik terbuka yang mengarah pada kekerasan, indikasi awal berupa meningkatnya kecurigaan dan melemahnya hubungan antartetangga perlu mendapat perhatian serius. Konflik sosial umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses akumulasi ketidakpuasan, hilangnya kepercayaan, dan terbentuknya stereotip negatif terhadap kelompok lain. Apabila kondisi tersebut tidak segera direspons melalui perbaikan tata kelola bantuan dan keterbukaan informasi, maka

potensi konflik horizontal dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih kompleks.

Analisis Teoritis: Gerakan Sosial Perkotaan dan Sosiologi Al-Qur'an

Demonstrasi Forum Korban Banjir Kota Langsa (FKBK) dapat dipahami sebagai gerakan sosial perkotaan yang lahir dari pengalaman ketidakadilan dalam distribusi bantuan pascabencana. Aksi tersebut tidak muncul dalam ruang sosial yang kosong, tetapi terbentuk melalui akumulasi ketidakpuasan warga terhadap keterlambatan bantuan, ketidakjelasan data penerima, serta persepsi mengenai adanya perlakuan yang tidak setara. Dalam perspektif teori gerakan sosial, kondisi tersebut menjadi basis terbentuknya kesadaran kolektif yang kemudian mendorong masyarakat mengubah ketidakpuasan individual menjadi tuntutan bersama. Dengan demikian, demonstrasi FKBK tidak sekadar merupakan reaksi spontan terhadap persoalan bantuan, tetapi dapat dibaca sebagai proses transformasi persoalan material menjadi tindakan kolektif.

Karakteristik tersebut terlihat dari beberapa unsur yang menyertai aksi FKBK, yaitu adanya persoalan material yang konkret, keterlibatan massa yang mengalami dampak bencana, tuntutan yang diarahkan secara jelas kepada pemerintah, serta penggunaan ruang publik sebagai sarana untuk memperoleh respons dan perubahan kebijakan. Keempat unsur tersebut memperlihatkan bahwa gerakan FKBK memiliki orientasi yang lebih luas daripada sekadar memperoleh bantuan bagi individu tertentu. Tuntutan yang berkembang mengarah pada persoalan keadilan distributif, akurasi pendataan, transparansi penyaluran, dan akuntabilitas pemerintah. Artinya, pengalaman ketidakadilan pada tingkat individu mengalami proses kolektivisasi sehingga menjadi agenda bersama.

Hal yang menarik adalah komposisi aktor dalam gerakan tersebut. FKBK tidak terutama digerakkan oleh aktor politik, organisasi kepentingan, atau aktivis profesional, melainkan oleh masyarakat yang mengalami dampak banjir secara langsung. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mobilisasi sosial tidak selalu membutuhkan struktur organisasi politik yang mapan. Pengalaman bersama sebagai korban bencana dapat menjadi sumber terbentuknya identitas kolektif dan solidaritas di antara warga. Ketika pengalaman tersebut dipersepsikan sebagai persoalan yang dialami oleh banyak orang, muncul kesadaran bahwa persoalan individual sebenarnya memiliki akar struktural yang sama. Pada titik inilah ketidakpuasan berubah menjadi gerakan sosial.

Namun, gerakan FKBK tidak berhenti pada bentuk konfrontasi antara masyarakat dan pemerintah. Perkembangan aksi menunjukkan adanya proses negosiasi yang kemudian menghasilkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki distribusi bantuan. Hal ini memperlihatkan bahwa gerakan sosial memiliki dimensi konstruktif: protes digunakan sebagai instrumen untuk membuka ruang komunikasi, mempertemukan kepentingan yang berbeda, dan mendorong institusi pemerintah memberikan respons terhadap tuntutan masyarakat. Dengan demikian, demonstrasi dalam kasus ini dapat dipahami

sebagai mekanisme partisipasi publik ketika saluran administratif dianggap belum mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat terdampak.

Dalam konteks tersebut, Sosiologi Al-Qur'an memberikan perspektif tambahan untuk memahami dimensi nilai yang berada di balik gerakan tersebut. Pendekatan ini tidak menempatkan Al-Qur'an semata-mata sebagai teks normatif yang berbicara mengenai persoalan ritual, tetapi sebagai sumber nilai yang dapat digunakan untuk membaca dan memahami realitas sosial. Nilai-nilai Qur'ani dapat mengalami proses transformasi dari prinsip normatif menjadi praksis sosial ketika berhadapan dengan situasi konkret, termasuk dalam kondisi masyarakat Aceh pascabencana (Aprilianti & M, 2022). Perspektif ini memungkinkan tindakan sosial masyarakat dibaca bukan hanya berdasarkan struktur, kepentingan, dan relasi kekuasaan, tetapi juga berdasarkan nilai yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Dalam kasus FKBK, tuntutan terhadap keadilan dan perlakuan yang setara dapat ditempatkan dalam konteks kesadaran moral masyarakat yang memiliki latar sosial-keagamaan yang kuat. Memang, para demonstran tidak secara eksplisit merumuskan tuntutannya dalam terminologi keagamaan. Bahasa yang digunakan dalam aksi lebih banyak berkaitan dengan bantuan, hak warga, keadilan, data penerima, dan tanggung jawab pemerintah. Namun, ketiadaan simbol atau terminologi agama dalam ekspresi protes tidak serta-merta menunjukkan bahwa tindakan tersebut terlepas dari nilai keagamaan. Nilai agama dapat bekerja secara lebih subtil sebagai orientasi moral yang memengaruhi cara masyarakat memahami keadilan, ketidakadilan, tanggung jawab, dan perlakuan terhadap sesama.

Dalam kerangka tersebut, gerakan FKBK dapat dipahami sebagai pertemuan antara pengalaman sosial dan kesadaran moral. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat menjadi pemicu mobilisasi, sementara nilai yang hidup dalam masyarakat memberikan orientasi mengenai kondisi yang dianggap benar dan salah. Sebagaimana dikemukakan Hanifah (2026), nilai-nilai ilahiyah dapat hadir dalam tindakan sosial masyarakat meskipun tidak selalu diekspresikan melalui bahasa atau simbol agama secara eksplisit. Karena itu, demonstrasi FKBK tidak tepat dipahami semata-mata sebagai gerakan yang bersifat "sekuler" hanya karena menggunakan demonstrasi dan tuntutan kebijakan sebagai instrumen perjuangan.

Pertemuan antara teori gerakan sosial dan Sosiologi Al-Qur'an pada akhirnya memperlihatkan dua dimensi yang saling melengkapi. Teori gerakan sosial menjelaskan bagaimana ketidakpuasan masyarakat berkembang menjadi mobilisasi kolektif, sedangkan Sosiologi Al-Qur'an membantu menjelaskan nilai dan orientasi moral yang dapat memberi makna terhadap tuntutan tersebut. Dalam perspektif ini, demonstrasi FKBK bukan hanya ekspresi ketidakpuasan terhadap distribusi bantuan, tetapi juga merupakan bentuk artikulasi masyarakat terhadap gagasan tentang keadilan dan tanggung jawab sosial. Gerakan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman bencana dapat menjadi ruang munculnya kesadaran kolektif, sementara nilai yang hidup dalam masyarakat memberikan arah terhadap tuntutan perubahan yang mereka perjuangkan.

Analisis Sosiologi Al-Qur'an

Pertama, tentang tata kelola publik;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa; 58)

Ayat ini menegaskan dua prinsip fundamental dalam tata kelola publik: penyampaian amanat kepada yang berhak dan penetapan hukum dengan adil. Dalam konteks kasus FKBK, bantuan banjir adalah amanat publik yang harus disalurkan kepada yang berhak menerimanya (korban banjir yang terdampak). Namun, realitas menunjukkan adanya penyimpangan: (1) ketidakjelasan data penerima yang "carut-marut", (2) dugaan nepotisme dan diskriminasi, dan (3) keterlambatan penyaluran yang berkepanjangan.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir (Linanda, 2021), ayat ini mengandung perintah untuk menunaikan segala bentuk amanah, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak sesama manusia. Dalam tafsir ini, amanah tidak hanya terbatas pada benda atau harta, tetapi juga mencakup jabatan dan tanggung jawab publik. Pemimpin yang diberi amanah untuk mengelola bantuan bencana harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengkhianati kepercayaan rakyat.

Dalam konteks tafsir sosial, penelitian tentang asbāb al-nuzūl QS. An-Nisa [4]:58 menegaskan bahwa ayat ini memiliki pesan universal tentang pentingnya amanah dan keadilan dalam kepemimpinan publik. Pesan ini tetap relevan lintas zaman karena didasarkan pada prinsip *al-'ibrah bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ as-sabab* (ibrah diambil dari keumuman lafal, bukan kekhususan sebab). Artinya, meskipun ayat ini turun dalam konteks tertentu, pesan pokoknya berlaku untuk semua konteks kepemimpinan dan tata kelola publik, termasuk penanganan bantuan bencana di Kota Langsa.

Demonstrasi FKBK pada dasarnya adalah tuntutan agar pemerintah menunaikan amanatnya dengan baik. Ketika warga menyuarakan kecurigaan tentang manipulasi data dan korupsi, mereka sedang mengingatkan bahwa amanah publik tidak boleh dikhianati. Dalam kerangka Sosiologi Al-Qur'an, gerakan ini dapat dibaca sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyimpangan amanah oleh pemegang kekuasaan.

Kedua, tentang keadilan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَّا
تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah; 8)

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk selalu menegakkan keadilan, bahkan ketika rasa benci terhadap suatu kelompok hadir. Prinsip ini memiliki implikasi ganda dalam kasus FKBBK. Pertama, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus berlaku adil dalam menyalurkan bantuan tanpa diskriminasi—tidak membedakan antara pendukung dan lawan politik, antara warga dari satu suku atau agama dengan yang lain, atau antara kaya dan miskin. Kedua, warga yang melakukan demonstrasi juga dituntut untuk bersikap adil dalam menyampaikan kritik, tidak menggunakan kekerasan, dan tidak menyebarkan fitnah tanpa bukti yang jelas.

Penelitian tentang konsep keadilan dalam (Qutb, 1992) menemukan bahwa keadilan dimaknai sebagai mewujudkan kesamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketika seseorang memutuskan suatu hukum atau memberikan kesaksian, harus dilakukan dengan adil, jujur, tidak berat sebelah, dan tidak membedakan—sekali pun terhadap diri sendiri, keluarga, kerabat, orang kaya, orang miskin, atau musuh sekali pun. Dalam konteks penyaluran bantuan banjir, prinsip ini berarti bahwa data penerima bantuan harus akurat dan mencerminkan kebutuhan riil warga, bukan kepentingan politik atau ekonomi pihak tertentu.

Dalam konteks fikih kebencanaan, bencana dipandang tidak hanya dari sudut teologis tetapi juga sosiologis (Roni et al., 2026). Secara teologis, Allah bersifat Rahman dan Rahim, sehingga bencana bukan ekspresi murka Allah, melainkan bentuk kasih sayang sebagai ruang muhasabah. Secara sosiologis, manusia sebagai khalifah memiliki mandat menjaga kelestarian alam dan menjalankan keadilan (Nendissa, 2022). Penanganan bencana yang tidak adil merupakan pelanggaran terhadap mandat kekhalifahan tersebut. Demonstrasi FKBBK pada intinya adalah seruan agar pemerintah menegakkan keadilan, sebagaimana diperintahkan dalam ayat ini. Ketika warga menuntut transparansi dan akuntabilitas, mereka sedang mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam kebijakan publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai fundamental yang diajarkan agama.

Ketiga, tentang resolusi konflik;

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat; 9)

Ayat ini memberikan panduan tentang resolusi konflik yang sangat relevan dengan kasus demonstrasi FKBK. Dalam konteks ini, ada dua pihak yang berpotensi berkonflik: pemerintah (yang dianggap gagal menunaikan amanah) dan masyarakat (yang merasa dirugikan). Ayat ini mengajarkan tiga langkah penting: Pertama, upaya damai (ishlāh) harus diutamakan. Dalam kasus FKBK, proses negosiasi yang berujung pada penandatanganan surat pernyataan oleh Wali Kota adalah bentuk ishlāh. Wali Kota berkomitmen untuk menyalurkan bantuan sesuai aturan tanpa diskriminasi dan menyerahkan masalah dugaan penyimpangan kepada aparat penegak hukum. Langkah ini sejalan dengan prinsip musyawarah yang diajarkan Al-Qur'an.

Kedua, jika salah satu pihak berbuat aniaya, maka harus dilawan sampai kembali kepada kebenaran. Dalam konteks ini, massa demonstrasi bertindak sebagai pihak yang "melawan" ketidakadilan yang dilakukan pemerintah (atau setidaknya yang diduga dilakukan). Aksi demonstrasi adalah bentuk tekanan agar pemerintah kembali ke jalur yang benar. Penelitian tentang prinsip-prinsip gerakan protes sosial dalam perspektif hukum Islam menemukan bahwa metode ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dibenarkan dalam Islam, selama dilakukan dengan cara yang tidak merusak dan tetap dalam koridor hukum. Demonstrasi dianggap sah sebagai bentuk hisbah (amar ma'ruf nahi munkar) dan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Islam.

Ketiga, setelah pihak yang bersalah kembali, maka harus didamaikan dengan adil. Langkah terakhir ini krusial untuk memulihkan harmoni sosial. Setelah kesepakatan tercapai, massa membubarkan diri dengan tertib. Namun, tindak lanjut dari kesepakatan tersebut—terutama implementasi penyaluran bantuan yang adil dan proses hukum terhadap dugaan korupsi—akan menentukan apakah resolusi konflik ini benar-benar berhasil atau hanya bersifat sementara. Dalam konteks tafsir sosial, penelitian tentang QS. Al-Hujurat [49]:9 menekankan bahwa ayat ini memiliki pesan universal tentang pentingnya rekonsiliasi dalam mitigasi konflik sosial. Prinsip al-'ibrah bi 'umūm al-

lafz menjadikan ayat ini relevan tidak hanya untuk konflik antarindividu, tetapi juga untuk konflik struktural antara masyarakat dan pemerintah. Rekonsiliasi yang adil adalah kunci untuk memulihkan harmoni sosial yang terganggu.

Konsep *Mustadh'afin* dan Gerakan Sosial

Konsep *mustadh'afin* (kaum lemah/tertindas) dalam Al-Qur'an menjadi lensa penting untuk membaca gerakan FKBK. Allah berfirman:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾

*“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (*mustadh'afin*) dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).” (QS. Al-Qashash; 5)*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa posisi sebagai kelompok yang dilemahkan tidak dipahami sebagai keadaan yang bersifat permanen. *Mustadh'afin* justru ditempatkan sebagai kelompok yang memiliki kemungkinan untuk mengalami pembalikan posisi sosial, dari pihak yang berada dalam kondisi lemah menjadi subjek yang memiliki peran dalam menentukan arah kehidupan bersama. Dengan demikian, konsep ini memiliki dimensi sosial yang penting karena tidak berhenti pada identifikasi terhadap penderitaan, tetapi juga mengandung gagasan mengenai pemulihan martabat, penguatan posisi, dan perubahan struktur yang menyebabkan seseorang atau kelompok berada dalam kondisi lemah.

Dalam konteks FKBK, konsep *mustadh'afin* dapat digunakan untuk membaca posisi korban banjir yang menghadapi keterbatasan akses terhadap bantuan pascabencana. Status sebagai korban bencana pada awalnya merupakan kondisi kerentanan yang bersifat material. Namun, kerentanan tersebut dapat menjadi semakin kompleks ketika mekanisme distribusi bantuan tidak mampu menjamin akses yang setara. Ketika sebagian korban tidak terdata, mengalami keterlambatan menerima bantuan, atau merasa diperlakukan berbeda, posisi mereka tidak lagi hanya sebagai korban bencana alam, tetapi juga sebagai kelompok yang menghadapi kerentanan dalam struktur distribusi kebijakan. Dalam pengertian inilah konsep *mustadh'afin* menjadi relevan sebagai kategori analitis.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan konsep *mustadh'afin* dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan seluruh korban banjir dengan kelompok tertindas secara absolut. Tidak setiap keterlambatan bantuan dengan sendirinya menunjukkan adanya penindasan struktural. Konsep tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kondisi kerentanan dapat diperkuat oleh mekanisme sosial dan administratif yang membuat sebagian kelompok lebih sulit memperoleh hak dibandingkan kelompok lainnya. Dengan demikian, yang

menjadi perhatian bukan hanya keadaan “lemah” yang dialami korban, tetapi juga proses sosial yang menyebabkan kelemahan tersebut bertahan atau semakin dalam.

Pada titik inilah posisi korban mengalami perubahan dari objek kebijakan menjadi subjek tindakan sosial. Masyarakat yang sebelumnya berada dalam posisi sebagai penerima bantuan kemudian mengorganisasi diri melalui FKBB, menyampaikan tuntutan secara terbuka, dan membangun tekanan kolektif terhadap pemerintah. Demonstrasi menjadi bentuk artikulasi kepentingan kelompok yang merasa belum memperoleh perlakuan yang adil. Fenomena ini menunjukkan adanya *agency* di tengah kondisi kerentanan. Dengan kata lain, menjadi *mustadh'afin* tidak berarti menjadi kelompok yang pasif. Sebaliknya, pengalaman ketidakadilan dapat menjadi sumber kesadaran kolektif dan mendorong kelompok yang berada dalam posisi lemah untuk mengambil tindakan dalam memperjuangkan haknya (Hidayatullah, 2019).

Perubahan tersebut juga memperlihatkan adanya proses transformasi dari pengalaman individual menuju identitas kolektif. Seorang warga yang tidak menerima bantuan mungkin pada awalnya melihat persoalan tersebut sebagai masalah pribadi. Namun, ketika pengalaman serupa ditemukan pada banyak korban lain, muncul kesadaran bahwa persoalan tersebut bukan lagi sekadar persoalan individual, melainkan masalah yang berkaitan dengan sistem pendataan dan distribusi bantuan. FKBB kemudian menjadi ruang yang mempertemukan pengalaman-pengalaman tersebut dan mengubahnya menjadi tuntutan kolektif. Proses ini penting dalam memahami bagaimana kelompok rentan dapat membangun kekuatan sosial melalui organisasi, solidaritas, dan mobilisasi.

Dalam perspektif gerakan sosial, proses tersebut memperlihatkan bahwa ketidakberdayaan material tidak selalu berujung pada kepasifan. Sebaliknya, ketika terdapat kesadaran mengenai ketidakadilan dan tersedia ruang untuk melakukan mobilisasi, kelompok rentan dapat mengembangkan kapasitas untuk memengaruhi kebijakan. Dalam konteks FKBB, kekuatan tersebut tidak terutama berasal dari sumber daya politik atau ekonomi, tetapi dari jumlah massa, pengalaman bersama sebagai korban, legitimasi moral sebagai kelompok terdampak, serta kemampuan membangun tuntutan yang dapat dipertanggungjawabkan di ruang publik.

Penelitian mengenai gerakan sosial keagamaan di Indonesia menunjukkan bahwa mobilisasi masyarakat sering kali berkembang sebagai respons terhadap pengalaman ketidakadilan dan krisis sosial, dengan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi sumber legitimasi moral bagi tindakan kolektif. Dalam kasus FKBB, dimensi tersebut hadir dalam bentuk yang lebih implisit. Gerakan ini tidak secara khusus mengusung simbol, jargon, atau organisasi keagamaan. Tuntutannya lebih banyak disampaikan melalui bahasa keadilan, hak warga, transparansi, dan tanggung jawab pemerintah. Namun, absennya ekspresi keagamaan secara eksplisit tidak meniadakan kemungkinan bahwa nilai-nilai keagamaan turut

membentuk cara masyarakat memahami ketidakadilan dan memperjuangkan hak.

Konsep *mustadh'afin* membantu menjelaskan dua sisi sekaligus dalam gerakan FKBK. Pada satu sisi, korban banjir berada dalam posisi rentan akibat bencana dan keterbatasan akses terhadap distribusi bantuan. Pada sisi lain, mereka memiliki kemampuan untuk mengubah kerentanan tersebut menjadi energi kolektif melalui organisasi dan aksi publik. Gerakan FKBK selanjutnya dapat dibaca sebagai proses transformasi dari korban menjadi warga yang menuntut hak, dan dari posisi yang dilemahkan menjadi subjek perubahan sosial. Perspektif ini memperluas pemahaman mengenai *mustadh'afin* dari sekadar kategori kelompok yang mengalami penderitaan menjadi konsep yang juga menjelaskan munculnya agensi, solidaritas, dan perjuangan untuk memperoleh keadilan dalam kehidupan sosial.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa demonstrasi Forum Korban Banjir Kota Langsa (FKBK) merupakan gerakan sosial perkotaan yang muncul dari ketidakpuasan masyarakat terhadap penyaluran bantuan pasca-bencana yang dianggap lamban, tidak transparan, dan tidak adil. Melalui pendekatan Sosiologi Al-Qur'an, penelitian ini menemukan bahwa tuntutan FKBK selaras dengan nilai-nilai fundamental Al-Qur'an tentang amanah (QS. An-Nisa [4]:58), keadilan (QS. Al-Maidah [5]:8), dan resolusi konflik (QS. Al-Hujurat [49]:9). Gerakan ini dapat dibaca sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyimpangan amanah publik sekaligus sebagai upaya menegakkan keadilan yang terancam oleh kebijakan yang tidak akuntabel.

Proses resolusi konflik yang terjadi mencerminkan nilai *ishlāh* (rekonsiliasi) dalam Al-Qur'an, di mana negosiasi dan musyawarah menjadi jalan keluar dari ketegangan. Namun, keberhasilan resolusi ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah ditandatangani. Kasus ini juga menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam kebijakan distributif tidak hanya berdampak pada relasi vertikal (warga-pemerintah), tetapi juga berpotensi mengancam harmoni sosial horizontal antarsesama warga.

REFERENCES

- Aprilianti, A. F., & M, A. (2022). Pendekatan historis sosiologis dalam studi Al-Qur'an: Telaah pemikiran Fazlur Rahman. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*.
- Gasselöglu, M. A., & Gonçalves, J. E. (2026). Reframing disaster recovery through spatial justice: An integrated framework. *Buildings and Cities*, 7(1), 196–214. <https://doi.org/10.5334/bc.701>

- Hafit, M. F. A., Saleh, M., & Darmadi, D. (2026). Distributive justice in post-disaster recovery governance in Aceh: A fiqh siyasah perspective. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 11(1), 1–15.
- Hanifah, F. A. (2026). *Tafsir ayat-ayat keadilan terhadap aksi demonstrasi Agustus Kelabu 2025 (Analisis hermeneutika Paul Ricoeur)* [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto]. Repository UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. <https://repository.uinsaizu.ac.id/40057/>
- Hidayatullah, A. (2019). *Mustadh'afin perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsa.ac.id/38202/>
- Joseph, J., et al. (2021). Disaster recovery and structural inequalities: A case study of community assertion for justice. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102555>
- K1-FKBK. (2026). Hasil wawancara dengan K1-FKBK tentang [topik penelitian] [Wawancara lapangan].
- K3-FKBK. (2026). Hasil wawancara dengan K3-FKBK tentang [topik penelitian] [Wawancara lapangan].
- Kalkman, J. P. (2026). Disaster justice: A literature review. *Progress in Disaster Science*, 29, 100533. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2026.100533>
- Linanda, S. R. (2021). *Konsep ta'aruf dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 (Kajian Tafsir Ibnu Katsir) dan relevansinya dengan pendidikan multikultural* [Skripsi, IAIN Curup]. E-Theses IAIN Curup. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/3588/>
- Nendissa, J. E. (2022). Kajian teologi sosial terhadap bencana alam banjir bagi masyarakat Karombasan di Kota Manado tahun 2021. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 11(1), 46–61. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v11i1.1259>
- P1-BPBD. (2026). Hasil wawancara dengan P1-BPBD tentang [topik penelitian] [Wawancara lapangan].
- Qutb, S. (1992). *Fi Zilal al-Qur'an* (Jilid 2). Dar al-Shuruq.
- Roni, M., Mariadi, M., & Rasyid, M. N. (2025). Dari musibah ke ketahanan sosial: Analisis Sosiologi Al-Qur'an terhadap praktik muamalat masyarakat Aceh Tamiang pasca banjir bandang. *Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2). <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.12504>
- Roni, M., Marhaban, Syam, N. F., & Aslam, M. M. (2026). Negotiation of disaster theology in the perspective of Living Qur'an: An analysis of community social response to the flood in Aceh Tamiang, Indonesia. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 10(2), 315–331. <https://doi.org/10.29240/alquds.v10i2.16869>
- Shrestha, K. K., Bhattarai, B., Ojha, H. R., & Bajracharya, A. (2019). Disaster justice in Nepal's earthquake recovery. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 33, 207–216. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.10.006>
- Syukri, M., [Nama Penulis Kedua], [Nama Penulis Ketiga], [Nama Penulis Keempat], [Nama Penulis Kelima]. (2025). Redefining resilience: How

- women in conflict find strength through integrated cultural values. *Asian Women*, 41(2), 133–155. <https://doi.org/10.14431/aw.2025.6.41.2.133>
- T2. (2026). Hasil wawancara dengan T2 tentang [topik penelitian] [Wawancara lapangan].
- Vestergren, S., Uysal, M. S., & Tekin, S. (2022). Do disasters trigger protests? A conceptual view of the connection between disasters, injustice, and protests—The case of COVID-19. *Frontiers in Political Science*. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.836420>
- W1. (2026). Hasil wawancara dengan W1 tentang [topik penelitian] [Wawancara lapangan].